

**PERANAN PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT SEBAGAI AGEN
PERUBAHAN DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT LOKAL:
KASUS KOTA BANJARMASIN**

***ROLE OF COMMUNITY SOCIAL EXTENSION WORKERS AS AGENT OF CHANGE
IN DEVELOPMENT LOCAL COMMUNITIES: CASE BANJARMASIN CITY***

Sugiyanto dan Suradi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika. 200 Cawang III Jakarta Timur
E-mail: sugiyanto222@ymail.com

Diterima: 4 Oktober 2019, Direvisi: 32 Maret 2020; Disetujui: 14 April 2020

Abstrak

Penyuluh sosial masyarakat memiliki peran penting dalam pengembangan masyarakat lokal. Artikel ini membahas tentang peranan penyuluh sosial masyarakat sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat lokal di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yaitu penyuluh sosial masyarakat, penanggung jawab kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Sosial Kota Banjarmasin, serta tokoh masyarakat. Data dihimpun dengan wawancara, dan diskusi kelompok terarah. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara kualitatif dalam bentuk naratif, sehingga diperoleh informasi tentang aktivitas penyuluh sosial masyarakat dan peranan mereka sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat lokal. Hasil penelitian, bahwa penyuluh sosial masyarakat telah melaksanakan peranannya sebagai agen perubahan, dan hasilnya sudah dirasakan oleh masyarakat lokal. Namun demikian, peranan yang dilaksanakan belum optimal disebabkan belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur peranan mereka, masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan terkait dengan pengembangan masyarakat, dan terbatasnya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar ada regulasi yang secara khusus mengatur tugas mereka, peningkatan kapasitas, serta pemberian dukungan sarana dalam pelaksanaan tugas mereka.

Kata kunci : *penyuluh sosial masyarakat, agen perubahan, pengembangan masyarakat lokal.*

Abstract

Community social volunteers have an important role in the development of local communities. This article discusses the role of social extension workers as agents of change in the development of local communities in the city of Banjarmasin. This research uses descriptive method with qualitative approach. The data sources are the community social instructor, the person in charge of the activities of the South Kalimantan Provincial Social Service and the Banjarmasin City Social Service, and community leaders. Data collected by interview, and focus group discussions. The data that has been collected is processed and analyzed qualitatively in narrative form, so that information is obtained about the activities of community social volunteers and their role as agents of change in the development of local communities. The results of the study, that the social instructor community has carried out their role as agents of change, and the results have been felt by the local community. However, the roles implemented are not optimal due to the absence of regulations that specifically regulate their roles, the lack of knowledge and skills related to community development, and the limited infrastructure that supports the implementation of tasks. Based on the research findings, suggest that there are regulations that specifically regulate their tasks, capacity building, and providing support facilities in carrying out their duties.

Keywords: *community social volunteers, agents of change, local community development.*

PENDAHULUAN

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pembangunan nasional, mengembangkan paradigm, di mana peran dan posisi lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku utama. Paradigma ini membawa perubahan secara mendasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang ditandai dengan melembaganya kepedulian dan kesetiakawanan sosial di masyarakat. Pada tingkat lokal dapat ditemukan, gerakan-gerakan sosial baik yang diinisiasi oleh perorangan maupun kelompok sebagai bentuk kepedulian sosial (lihat Affandi, 2002; Suhendi, 2013; .Barlan, 2018).

Gerakan-gerakan sosial tersebut kemudian dikenal dengan pilar-pilar sosial yang sifatnya relawan sosial, seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Taruna Siaga Bencana dan Pemuda Pelopor (Suradi, 2019; Aminah & Prasetyo, 2018; Juliantara, 2014; Indarwati, 2014; Kholisah, 2013; Suyanto, 2006). Kemudian tahun 2016, Kementerian Sosial RI memfasilitasi lahirnya penyuluh sosial masyarakat, menambah pilar-pilar sosial yang sudah ada. Penyuluh sosial masyarakat ini wilayah kegiatannya di tingkat lokal (desa/kelurahan) disiapkan menjadi agen perubahan dalam pengembangan masyarakat lokal (Puslitbangkesos, 2018; Republik Indonesia, 2009).

Pada konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penyuluh sosial masyarakat ini merupakan salah satu Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 33 menegaskan bahwa sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terdiri dari 4 pilar, yakni (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial; (2) Pekerja Sosial; (3)

Relawan Sosial; dan (4) Penyuluh Sosial. Sebagai salah satu pilar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, keberadaan penyuluh sosial masyarakat dapat dikatakan masih relatif baru dibandingkan dengan pilar-pilar sosial yang lain (Susantyo, Sugiyanto, Habibullah, Suradi, Irmayani, Nainggolan & Mujiyadi, 2018; Habibullah, Irmayani, Mujiyadi, Suradi, Susantyo, Nainggolan, 2018).

Keberadaan penyuluh sosial masyarakat ini diatur di dalam Peraturan Menteri Sosial RI No.10 Tahun 2014 Tentang Penyuluhan Sosial. Pada Bagian Kedua Pasal 14 ayat (1) bahwa Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a terdiri atas: a. Penyuluh Sosial Fungsional; dan b. Penyuluh Sosial Masyarakat. Penyuluh Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tokoh masyarakat baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, dan tokoh pemuda yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial pusat maupun daerah untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sebelum melaksanakan tugasnya, mereka memperoleh pelatihan dasar agar menguasai materi dan metode penyuluhan sosial.

Keberadaan penyuluh sosial masyarakat ini akan menjadi penggerak terjadinya perubahan dan upaya pengembangan masyarakat di tingkat lokal. Dikemukakan oleh Didik (2019), bahwa penyuluh sosial masyarakat memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam rangkaian pembangunan kesejahteraan sosial. Peran dan fungsi tersebut antara lain sebagai motivator, komunikator dan edukator dalam program pembangunan kesejahteraan sosial.

Berbagai peran tersebut menempatkan penyuluh sosial masyarakat sebagai agen

perubahan dalam pengembangan masyarakat di tingkat lokal bersama-sama dengan Karang Taruna dan pilar-pilar sosial lainnya (Suradi, 2019). Agen perubahan menurut Lunenburg (2010), *is anyone who has the skill and power to stimulate, facilitate, and coordinate the change effort*. Lunenburg (2010) berpendapat, bahwa agen perubahan itu bisa individu, kelompok, dan organisasi, yang memiliki keterampilan dan kekuatan untuk menstimulasi, memfasilitasi, dan mengoordinasi kan upaya perubahan. Kemudian menurut Anwar (2013), bahwa penghubung antara sumber ide perubahan dengan target masyarakat yang diharapkan mengadopsi ide atau teknologi yang ditawarkan oleh produser “ide dan teknologi”. Elemen penghubung termaksud disebut sebagai “agen perubahan/agent of change”.

Penyuluh sosial masyarakat sebagai agen perubahan, diharapkan mampu melaksanakan peranan sebagai stimulator, orang yang memberikan rangsangan kepada masyarakat lokal untuk melakukan perubahan; sebagai fasilitator, orang yang memberikan kemudahan atau akses kepada layanan sehingga terjadinya perubahan; koordinator, orang yang mengkoordinasikan berbagai sistem sumber sehingga mengarah pada tujuan yang sama untuk perubahan; dan mediator, orang yang menghubungkan atau memediasi berbagai kepentingan untuk mencapai perubahan.

Peranan yang dilaksanakan oleh penyuluh sosial masyarakat tersebut akan mengantarkan masyarakat lokal mencapai perubahan sebagaimana dikehendaki. Perubahan dalam arti pengembangan masyarakat dimaksud adalah terjadinya proses peningkatan ke arah kondisi kehidupan masyarakat lokal, baik secara sosial maupun ekonomi. Proses peningkatan ke arah kondisi kehidupan yang lebih baik itu merupakan kata kunci dari

pengembangan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Flora dan Arnold (2012) bahwa pengembangan masyarakat merupakan proses untuk meningkatkan kualitas hidup, kesehatan ekosistem, dan keamanan ekonomi bagi semua orang di wilayah geografis.

Pengembangan masyarakat berhasil apabila berbasis pada kebutuhan masyarakat, dan melibatkan masyarakat dalam proses. Sebagaimana dikemukakan oleh Barr (2014), pengembangan masyarakat yang sukses apabila didukung keterampilan dan pengetahuan yang dikembangkan oleh orang-orang dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, peran agen perubahan tidak boleh mematikan sikap kritis masyarakat, dan justru mengelola sikap kritis tersebut untuk mencapai perubahan.

Keberhasilan Saemaul Undong di Korea Selatan, patut menjadi *best practice* keberhasilan pengembangan masyarakat lokal. Pertama, bimbingan dan dukungan pemerintah nasional untuk gerakan ini memainkan peran yang sangat penting. Kedua, ada berbagai partisipasi masyarakat dalam proses implementasi. Ketiga, Saemaul Undong dapat membuat sukses besar dengan memelihara kepemimpinan masyarakat yang dipilih oleh penduduk desa itu sendiri. Akhirnya, sebagai gerakan untuk reformasi spiritual, Saemaul Undong mengilhami orang-orang dengan semangat ketekunan, kemandirian, dan kerja sama (Choe, 2005).

Berdasar pengalaman Korea Selatan di atas, pengembangan masyarakat menghendaki penyuluh sosial masyarakat tidak memasuki area atau aktivitas-aktivitas yang dapat dikerjakan oleh masyarakat sendiri. Karena hakikat pengembangan masyarakat adalah dari, untuk dan oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pelaku utama untuk melanjutkan aktivitiats bersama guna mencapai perubahan yang dikehendaki.

Penyuluh sosial masyarakat di Banjarmasin berjumlah 30 orang. Tetapi sampai dengan penelitian ini dilaksanakan (2018), tinggal 23 orang yang aktif, dan 7 (tujuh) orang relawan mengundurkan diri dengan berbagai alasan, antara lain karena alasan pekerjaan dan alasan keluarga.

Penyuluh sosial masyarakat hadir di tengah-tengah masyarakat lokal (desa) pada tahun 2016 yang diinisiasi oleh Pusat Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI. Oleh karena itu, penelitian yang membahas tentang peranan penyuluh sosial masyarakat ini masih sangat terbatas. Di sisi lain, Pusat Penyuluhan Sosial memerlukan informasi tentang peranan penyuluh sosial masyarakat sebagai dasar pengembangan kebijakannya. Kebutuhan akan informasi inilah yang menjadi alasan bahwa penelitian tentang Peranan Penyuluh Sosial Masyarakat ini perlu dilakukan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan peran penyuluh sosial masyarakat sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat di Kota Banjarmasin.

Data dan informasi dikumpulkan melalui wawancara dan diskusi kelompok terarah. Sebagai responden dalam penelitian ini yaitu penyuluh sosial masyarakat sebanyak 23 orang, penerima manfaat 10 orang. Kemudian, Informan yang terpilih dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, aparat kecamatan dan aparat kelurahan, masing-masing satu orang. Data yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dalam bentuk naratif.

Analisis menghasilkan informasi deskripsi empat aspek yang menjadi perhatian dalam penelitian ini, yaitu: aktivitas penyuluhan dan hasil yang dicapai dari pelaksanaan penyuluhan yang difokuskan pada aspek: (1) pengetahuan masyarakat tentang masalah dan sumber kesejahteraan sosial; (2) Perilaku/gerakan sosial masyarakat untuk menangani PMKS; (3) kohesi/ketahanan sosial masyarakat; dan (4) kelompok swadaya dan jaringan sosial masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin adalah merupakan ibu kota dari provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Terdiri dari atas 5 kecamatan, yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Utara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai undang-undang. Pada tahun 2017, jumlah kelurahan di Kota Banjarmasin sebanyak 52 kelurahan yang terbagi menjadi 116 Rukun Warga (RW) dan 1.569 Rukun Tetangga (RT).

Kota Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 692.793 jiwa, terdiri penduduk laki-laki berjumlah 347.408 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 345.385 jiwa, dengan luas wilayah sebesar 98,46 km². Berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah, maka kepadatan penduduk Kota Banjarmasin mencapai 7.036 penduduk/Km² (BPS Kota Banjarmasin, 2017).

B. Identitas Responden

Ada dua kategori responden dalam penelitian ini, yaitu penyuluh sosial

masyarakat dan warga masyarakat sebagai penerima manfaat penyuluhan sosial.

1. Penyuluh sosial masyarakat

Responden penyuluh sosial masyarakat berjumlah 23 orang relawan. Dilihat dari jenis kelamin laki-laki 11 orang relawan dan perempuan 12 orang relawan, dengan rentang usia antara 23 tahun sampai 54 tahun. Pendidikan rata-rata SLTA berjumlah 18 orang relawan dan S1 berjumlah 5 orang relawan. Mayoritas bekerja dibidang swasta.

2. Penerima manfaat

Responden penerima manfaat, berjumlah 10 orang, seluruhnya perempuan, rata-rata sebagai ibu rumah tangga, dan berumur antara 32 – 48 tahun.

C. Aktivitas Penyuluh Sosial

Penyuluh sosial masyarakat terbentuk pada tahun 2017, dan pada tahun itu pula diberikan bimbingan teknis sebelum melaksanakan aktivitas penyuluhan sosial di masyarakat. Berbekal artibut yang berupa jaket yang bertulisan “Penyuluh Sosial Masyarakat”, mereka bersemangan untuk melakukan aktivitas penyuluhan sosial di masyarakat.

Sebelum melakukan penyuluhan sosial, penyuluh sosial melakukan persiapan-persiapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyuluhan

Langkah yang perlu ditempuh untuk mengurangi kegagalan dalam kegiatan apapun adalah melakukan perencanaan yang matang. Berdasarkan temuan penelitian, semua penyuluh sosial masyarakat melakukan persiapan penyuluhan sebelum melaksanakan tugas. Sebagaimana dikemukakan oleh penyuluh sosial (IK) : “Kami membuat rencana kerja sebelum melaksanakan penyuluhan. Misalnya, materi apa yang

akan disuluhkan ke masyarakat, kapan waktunya dan di mana penyuluhan sosial dilaksanakan. Pada tahap ini kami secara tim membagi tugas, siapa melakukan apa di lokasi nanti”,

Rencana kerja disusun bersama dalam tim kerja, sehingga setiap orang sudah mengetahui tugas masing-masing di lapangan. Rencana kerja yang dibuat oleh penyuluh sosial masyarakat, ada yang sudah dalam bentuk dokumen rencana, tetapi sebagian besar masih dalam lisan. Rencana kerja tertulis msih terbatas pada *hand phone* atau dalam bentuk tulisan tangan. Kelemahan terkait dengan perencanaan ini, tidak ada pengarsipan, sehingga mengandalkan ingat penyuluh sosial.

Pada tahap persiapan, penyuluh sosial masyarakat melakukan koordinasi dengan aparat desa, pilar-pilar sosial dan tokoh masyarakat calon lokasi kegiatan. Hasil dari koordinasi ini penyuluh sosial masyarakat memperoleh dukungan dari aparat setempat (desa/ kelurahan), pilar-pilar sosial lain (Karang Taruna, PSM) dan warga masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak ini dinilai banyak membantu atau meringankan tugas penyuluh sosial masyarakat. Dukungan yang diperoleh penyuluh sosial masyarakat dari kegiatan koordinasi ini, seperti ketersediaan sarana prasarana, dan konsumsi.

Manfaat koordinasi ini sebagaimana dikemukakan oleh penyuluh sosial (AM):” *kami mendapat dukungan dan bantuan dari aparat desa, rekan sesama pilar-pilar sosial, tokoh masyarakat dan warga masyarakat. Bantuan dan dukungan mereka cukup besar kontribusinya persiapan penyuluhan sosial”*.

2. Pelaksanaan Penyuluhan

Untuk mengetahui pelaksanaan penyuluhan sosial, dihimpun informasi yang berkenaan dengan frekuensi penyuluhan, sasaran, lokasi, metode dan kemitraan.

Dilihat dari frekuensinya, sebesar 63,30 persen penyuluh sosial melaksanakan penyuluhan lebih 6 (enam) kali pada 6 (enam) bulan terakhir atau satu kali per bulan. Frekuensi tersebut menggambarkan, bahwa penyuluh sosial telah secara aktif (proaktif) dan memiliki motivasi yang tinggi dalam memberikan penyuluhan sosial. Mengingat untuk pelaksanaan penyuluhan sosial ini, penyuluh sosial belum memperoleh dukungan biaya operasional dari Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial Provinsi maupun Kabupaten.

Sebagai sasaran penyuluhan sosial adalah keluarga (47,62%), perorangan (38,10%) dan masyarakat (14,28%). Data tersebut menggambarkan, bahwa penyuluh sosial masyarakat tidak saja melakukan aktivitas pada tingkat makro (*community*), tetapi juga mezzo (*family*) dan micro (*individual*). Pada tingkat micro, ini berarti penyuluh sosial bukan lagi melakukan sosial, tetapi penyuluh sosial masyarakat sudah melakukan kegiatan konseling. Dikemukakan oleh penyuluh sosial masyarakat (AM): “*sasaran penyuluhan sosial meliputi individu, keluarga dan masyarakat. Sejujurnya kami belum memiliki keterampilan yang memadai, tetapi kondisi di lapangan menghendaki kami untuk memberikan informasi dan penjelasan untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat*”.

Penyuluh sosial sebaiknya menguasai materi utama penyuluhan sosial. Materi penyuluh sosial secara umum adalah program kesejahteraan sosial, motivasi

dan edukasi. Materi tentang program kesejahteraan sosial, merupakan materi utama yang perlu dikuasai oleh penyuluh sosial, sesuai dengan peran dan tugasnya sebagai pilar-pilar sosial. Sebesar 52 persen penyuluh sosial masyarakat menguasai materi utama, terkait dengan program kesejahteraan sosial. Sedangkan materi di luar kesejahteraan sosial, mereka kembangkan sendiri sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman selama ini,

Lokasi yang paling sering digunakan untuk kegiatan penyuluhan sosial adalah rumah warga (80 %) dan warung/pasar (45%). Lokasi-lokasi kegiatan penyuluh-an sosial tersebut menggambarkan, bahwa penyuluhan sosial lebih banyak/sering berlangsung dalam suasana informal. Dengan suasana informasi, maka terjalin relasi sosial yang lebih akrab dan penuh rasa kekeluargaan. Sebagaimana dikemukakan oleh penyuluh sosial (TB):” *warga masyarakat menerima kehadiran kami sebagai orang yang bisa memberikan pencerahan. Kami bicara secara informal ..ya bincang-bincang ringan gitulah setiap pertemuan dengan suasana yang akrab dan kekeluargaan.*”.

Metode yang digunakan oleh semua penyuluh sosial masyarakat adalah ceramah, diskusi atau dialog dan kunjungan ke rumah. Pemilihan metode tersebut disesuaikan dengan kelompok penerima manfaat dan lokasi kegiatan penyuluhan sosial. Meskipun metode-metode tersebut sudah digunakan, tetapi masih ada penyuluh sosial yang belum menguasai metode yang digunakan. Sebagai jalan keluarnya, mereka melakukan penyuluhan sosial secara tim kerja, tidak sendiri-sendiri.

Penyuluh sosial masyarakat sudah menjalin kerja sama atau memperoleh

fasilitasi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan tugasnya. Instansi tersebut, yaitu (1) Dinas Pendidikan, dalam kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah terkait isu pergaulan bebas, narkoba, dan HIV/AIDS; (2) Dinas Kesehatan, dalam kegiatan merujuk klien berobat ke Puskesmas; (3) Dinas Pariwisata, sebagai pemicu (daya ungkit) ekonomi warga masyarakat; (4) Bulog, dalam kegiatan operasi pasar (beras murah).

Kemitraan yang sudah dibangun oleh penyuluh sosial masyarakat tersebut menggambarkan, bahwa (1) keberadaan penyuluh sosial telah memperoleh pengakuan dari berbagai pihak, termasuk dari organisasi Pemerintah Daerah (OPD), (2) cakupan kegiatan penyuluhan menjadi bervariasi dalam memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, dan (3) bahwa keberadaan penyuluh sosial masyarakat bukan hanya untuk kepentingan sektoral Kementerian Sosial, tetapi semua OPD dapat memanfaatkan penyuluh sosial masyarakat untuk kepentingan program mereka. Sebagaimana dikemukakan oleh penyuluh sosial (IK): *“Instansi pemerintah daerah sudah mulai memberikan kepercayaan kepada kami. Kami beberapa kali dilihat pada kegiatan mereka untuk penyuluhan maupun distribusi bantuan”*.

Penyuluh sosial masyarakat sebagai relawan sosial disebut sebagai penolong masyarakat (*community helpers*), apabila dilihat dari aktivitas yang dilakukan mereka dalam upaya perubahan masyarakat. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar dalam upaya pengembangan masyarakat lokal. Dikemukakan oleh Maymut (2019), bahwa *“community helpers are people who live and work in*

our communities...volunteers” Kekuatan penyuluh sosial masyarakat, bahwa mereka adalah orang setempat yang lebih memahami situasi dan kultur masyarakatnya. Hal ini menyebabkan mereka relatif tidak menghadapi resistensi ketika melakukan perubahan.

D. Hasil yang Dicapai

Untuk mengetahui hasil yang dicapai dari aktivitas penyuluhan sosial, digunakan 4 (empat) aspek, yaitu (1) pengetahuan masyarakat tentang masalah dan sumber kesejahteraan sosial, (2) perilaku/gerakan sosial untuk menangani PMKS, (3) kohesi/ketahanan sosial dan (4) kelompok swadaya dan jaringan sosial. Setiap aspek memiliki kategori rendah, moderate dan tinggi. Ketiga kategori tersebut digunakan untuk menggambarkan kinerja penyuluh sosial masyarakat.

1. Pengetahuan masyarakat tentang masalah dan sumber kesejahteraan sosial

Penerima manfaat (masyarakat) mengalami perubahan pengetahuan mereka tentang masalah dan sumber kesejahteraan sosial. Ini merupakan pengetahuan dasar yang perlu diketahui masyarakat, karena dengan pengetahuan ini masyarakat memiliki landasan untuk melakukan perubahan lebih baik.

Hasil penelitian sebesar 44 persen masyarakat memiliki pengetahuan tentang masalah, potensi dan sumber kategori tinggi, 45 persen kategori moderate dan 11 persen kategori rendah.

Pengetahuan penerima manfaat tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui hasil pelaksanaan

penyuluhan sosial. Hal ini relevan dengan posisi dan eksistensi penyuluh sosial, di mana kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat difasilitasi oleh Kementerian Sosial sebagai penyelenggara program kesejahteraan sosial. Berkaitan dengan itu, PMKS dan PSKS adalah kelompok sasaran program kesejahteraan sosial yang perlu ditemukenali oleh masyarakat.

Setelah dilakukan penyuluhan sosial hingga terjadinya peningkatan pengetahuan masyarakat/penerima penyuluhan sosial. Terjadi pergerakan peningkatan pengetahuan yang cukup signifikan dari rendah ke arah moderate dan tinggi. Berdasarkan data pada diagram 1 (satu), skor tinggi sebesar 44 persen, moderat sebesar 45 persen, dan rendah sebesar 11 persen.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui perubahan pengetahuan penerima manfaat tentang PMKS adalah mereka dapat menyebutkan dan menjelaskan minimal dua PSKS yang ada di lingkungan sekitarnya, meskipun dengan terminologi yang dibangun sendiri. Misalnya, Pembimbing Sosial Masyarakat (PSM) dengan istilah orang yang suka membantu mengurus surat keterangan miskin.

2. Perilaku/gerakan sosial masyarakat untuk menangani PMKS

Perilaku/gerakan sosial masyarakat untuk menangani PMKS, merupakan salah satu indikator untuk mengukur hasil pelaksanaan penyuluhan sosial. Setelah masyarakat mengetahui PMKS, maka diharapkan mereka melakukan aksi sosial atau gerakan sosial menangani PMKS yang ada di lingkungannya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan perilaku/gerakan sosial masyarakat untuk menangani PMKS.

Hasil penelitian sebesar 36 persen masyarakat telah melakukan gerak sosial untuk menangani PMKS, 37 persen kategori moderate dan 27 persen kategori rendah. Hal ini berarti, bahwa masyarakat sebagian besar menunjukkan perilaku/gerakan sosial dalam menangani PMKS di lingkungannya. Terjadinya peningkatan perilaku/gerakan sosial penerima manfaat ini menunjukkan, bahwa kinerja penyuluh sosial sudah baik. Data yang menggambarkan perubahan positif pada aspek perilaku/gerakan sosial penerima manfaat, sebagai informasi bahwa penyuluh sosial sudah memberikan hasil dalam pelaksanaan penyuluhan sosial.

3. Kohesi/ketahanan sosial masyarakat

Kohesi sosial menggambarkan kondisi masyarakat yang diliputi kepedulian sosial satu sama lain. Kondisi ini ketika terlembaga akan memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Penyuluh sosial memiliki peran penting untuk mewujudkan kohesi sosial dan ketahanan sosial masyarakat sebagai unsur dari kesejahteraan.

Hasil penelitian sebesar 47 persen masyarakat memiliki kohesi sosial yang tinggi, 36 persen kategori moderate dan 14 persen kategori rendah. Hal ini menunjukkan, bahwa terjadi peningkatan kohesi/ketahanan sosial masyarakat dalam menangani PMKS yang ada di lingkungannya setelah menerima penyuluhan sosial. Terjadi pergerakan peningkatan perilaku/gerakan sosial yang cukup signifikan dari rendah (14%) ke arah moderate (36%) dan tinggi (47%).

4. Kelompok swadaya dan jaringan sosial masyarakat

Terjadinya peningkatan kelompok sosial masyarakat dan jejaring sosial

dalam peningkatan kesadaran penerima manfaat, terkait dengan: keikutsertaan dalam mengembangkan kelompok swadaya, dukungan terhadap pilar-pilar sosial, dukungan terhadap tersedianya media/tempat informasi sosial masyarakat, ikut/dukungan mengembangkan jejaring sosial dengan sistem sumber, dan ikut/dukungan setiap kegiatan sosial kemasyarakatan tidak bergantung dari luar.

Hasil penelitian sebesar 69 persen masyarakat sudah membangun kelompok swadaya dan jaringan sosial dalam penanganan PMKS, 21 persen kategori moderate dan 10 persen kategori rendah. Hal ini menunjukkan, bahwa terjadi peningkatan kelompok swadaya dan jejaring sosial, yang dapat terlihat dari aktivitas dalam keikutsertaan mengembangkan kelompok swadaya. Selain itu aktivitas masyarakat untuk memberikan dukungan kepada pilar-pilar sosial, juga cukup meningkat. Begitu pula aktivitas masyarakat pada dukungan tersedianya media/tempat informasi sosial masyarakat juga cukup meningkat.

Komponen yang mengalami perubahan lebih baik pada masyarakat, adalah aspek kognitif (pengetahuan), afektif (kohesi sosial) dan psikomotorik (tindakan dan jaringan sosial). Ketiga komponen tersebut merupakan kunci dalam pengembangan masyarakat lokal. Pengetahuan, perasaan sosial dan tindakan bersama, akan menjadi modal sosial yang besar dalam upaya pengembangan masyarakat lokal (Bhandari & Yasunobu, 2009), yang akan berdampak pada pembangunan ekonomi masyarakat (Delic, Saric & Osmanovic, 2017).

Perubahan yang dicapai oleh masyarakat setelah memperoleh penyuluhan sosial masyarakat, atau sebagai dampak dari

penyuluhan sosial, menegaskan bahwa penyuluh sosial masyarakat merupakan agen perubahan masyarakat Lunenburg, 2010; Anwar, 2013), dan sekaligus sebagai penolong masyarakat (Maymut, 2019). Hal ini memberikan umpan balik bagi Kementerian Sosial maupun instansi sosial di daerah, perlu mengisi desa/kelurahan yang belum ada penyuluh sosial masyarakat.

E. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

a) Semangat kerja penyuluh sosial

Ini berarti bahwa pasca pelatihan, penyuluh sosial masyarakat dengan segala kelebihan dan kekurangannya, menyatakan siap untuk bekerja.

b) Dukungan dari dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota.

Dukungan Dinas sosial diberikan secara kekeluargaan dengan memperlakukan mereka sebagai bagian dari penyelenggara usaha kesejahteraan sosial.

c) Jaket penyuluh membenatu

Manfaat jaket penyuluh terutama terasa pada awal terjun ke masyarakat. Hanya dengan modal ‘jaket’ penyuluh sosial mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari berbagai pihak dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial.

d) Aspirasi warga walau hanya sebatas ucapan terimakasih

Walau sangat sederhana, ucapan terimakasih yang disampaikan individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat ternyata sangat bermakna bagi penyuluh sosial. Kehadiran mereka sudah merasa diakui dan dihargai serta mendapatkan dukungan sosial.

- e) Tersedianya sarana pribadi penyuluh berupa sepeda motor

Ketersediaan sepeda motor dan *hand phone* secara pribadi, sebagai peralatan kerja yang sangat membantu pelaksanaan tugas penyuluhan sosial di lapangan. Meskipun tanpa fasilitas dari pemerintah, penyuluh sosial tetap melaksanakan tugas dengan peralatan yang mereka miliki secara pribadi.

2. Faktor Penghambat

- a) Legalitas (belum ada SK atau surat tugas)

Penyuluh sosial masyarakat belum dibekali dengan Surat Keputusan Menteri Sosial dan Surat Tugas untuk melaksanakan penyuluhan. Meskipun sejauh ini tidak terjadi permasalahan serius di lapangan, namun sebagian penyuluh sosial masyarakat merasa was-was karena tidak memiliki SK dan Surat Tugas tersebut. Mereka merasa kurang nyaman dan takut keberadaan mereka dipersoalkan ketika menyelesaikan masalah sosial di masyarakat.

- b) Dana operasional

Meskipun sifatnya relawan, penyuluh sosial masyarakat perlu dukungan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan operasional hal ini dikarenakan kegiatan penyuluhan sosial di masyarakat memerlukan dana operasional yang tidak sedikit, terutama untuk transportasi dan akomodasi.

- c) Belum diperkenalkan ke pihak terkait

Pihak terkait dimaksud adalah pejabat fungsional penyuluh, aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat,

dan pilar-pilar pembangunan kesejahteraan sosial lainnya. Persoalan ini menyebabkan ruang gerak penyuluh sosial kurang leluasa dalam bekerja.

- d) Pendidikan relawan penyuluh sosial masyarakat

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan mereka sangat berbeda berdasarkan tingkat pendidikan dan disiplin keilmuannya. Kemampuan penyuluh sosial masyarakat dengan pendidikan sarjana (S1), jauh lebih baik dibandingkan dengan kelompok penyuluh sosial masyarakat dengan pendidikan SLTA. Bahkan dalam beberapa kasus peneliti menemukan kesalahan penyuluh sosial masyarakat berpendidikan SLTA dalam menjelaskan beberapa konsep PMKS.

KESIMPULAN

Penyuluh sosial masyarakat menempati posisi sangat strategis dalam pengembangan masyarakat lokal. Penyuluh sosial masyarakat melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya perubahan masyarakat lokal. Dan keberadaan mereka sebagai agen perubahan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal. Empat aspek yang menjadi perhatian dalam penelitian ini, yaitu: pengetahuan masyarakat tentang masalah dan sumber kesejahteraan sosial; perilaku/gerakan sosial masyarakat untuk menangani PMKS;; kohesi/ketahanan sosial masyarakat; dan kelompok swadaya dan jaringan sosial masyarakat. Dari keempat aspek tersebut, aspek pertama, kedua dan ketiga menunjukkan kemajuan yang masih rendah (di bawah 50 persen). Sementara untuk aspek keempat kemajuan terjadi pada di atas 50 persen responden.

Disimpulkan bahwa peranan penyuluh sosial masyarakat sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat lokal, belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini menghendaki penguatan pada sisi pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan kegiatan dalam pengembangan masyarakat lokal.

Faktor yang mendukung pelaksanaan peranana penyuluh sosial masyarakat dalam pengembangan masyarakat berasal dari pemerintah setempat, aseptabilitas masyarakat atas kehadiran penyuluh sosial serta kepiawaian penyuluh sosial memanfaatkan media setempat dalam melaksanakan penyuluhan. Adapun sebagai faktor yang menghambat adalah belum adanya regulasi yang menguatkan keberadaan penyuluh sosial, jumlah penyuluh sosial yang terbatas, tingkat kemampuan masih rendah serta dukungan sarana dan prasarana yang terbatas

SARAN

Untuk itu, secara rinci direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada Kementerian Sosial cq Pusat Penyuluhan Sosial
 - a. Menerbitkan Peraturan Menteri Sosial RI tentang Penyuluh Sosial Masyarakat.
 - b. Menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis tentang Penyuluh Sosial Masyarakat, yang di dalamnya mengatur secara jelas tentang kriteria, pola rekrutmen, tugas dan fungsi, pola pembinaan, dan apresiasi.
 - c. Melaksanakan pembekalan dan atau peningkatan kapasitas penyuluhan sosial, sehingga memiliki keterampilan khusus yang membedakan dengan pilar-pilar sosial yang lain.
 - d. Memberikan perlengkapan pelaksanaan tugas, seperti rompi, topi, jas hujan, lampu senter dan atribut lainnya yang diperlukan.
 - e. Memberikan dana operasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
 - f. Mempersiapkan penyuluh sosial untuk mengikuti pemilihan pilar-pilar sosial teladan nasional.
 - g. Meskipun sifatnya relawan namun relawan penyuluh sosial masyarakat perlu diberikan apresiasi baik melalui tali asih maupun dukungan pendanaan lain untuk pelaksanaan kegiatan.
2. Kepada Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - a. Dinas Sosial Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Tugas.
 - b. Memberikan pembinaan (bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan) dengan alokasi dana APBD I atau APBD II.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas penyuluh sosial.
 - d. Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan rekrutmen dengan melibatkan Dinas Sosial Provinsi.
 - e. Memberikan fasilitas pelaksanaan tugas penyuluh sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada reviewer yang telah memberikan kritik dan amsukan untuk pernbaikan artikel ini, dan ketua redaksi yang memberikan kesempatan untuk menerbitkan artikel kami.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi,O, (2002), Tinjauan Antropologi Pelibatan Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kehutanan, https://www.researchgate.net/publication/42320268_Tinjauan_Antropologi_Pelibatan_Masyarakat_Lokal_Dalam_Pembangunan_Kehutanan

- Aminah.S & Prasety.I, (2018), Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Organisasi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 5 (1), 2018,61-73/<http://dx.doi.org/0.21831/jppm.v5i1.17531>.
- Anwar.S, (2013), Agen Perubahan (*Agent of Change*), https://bppk.kemenkeu.go.id/images/file/pusbc/artikel/2013_Agen_Perubahan.pdf, diakses 23 Jan 2019.
- Badan Pusat Statistik (2017). Kota Banjarmasin Dalam Angka. Banjarmasin: Badan Pusat Statistik.
- Barlan,Z,A., (2018), Local Institutional Role Analysis Of Economic Condition Of Multiethnic Rural Community In Bonegunu District North Buton Regency), *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, Vol. 2 (2): 147-154, DOI: <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.2.147-154>.
- Barr.A, (2014) Community Development, Scottish Community Developmetn Centre and Community Developmetn Allience Scotland, <https://static1.squarespace.com/static/>, diakses 20 Jan 2019.
- Bhadari.H & Yasunobu.K, (2009), What is Social Capital? A Comprehensive Review of the Concept / *Asian Journal of Social Science*, Volume 37, Number 3, 2009, pp. 480-510.
- Choe, Ch.S, (2005), Key Factors to Successful Community Development: The Korean Experience (Discussion Paper No 39), 2005, 11, <https://core.ac.uk/download/pdf/10843695.pdf>/diakses 28 Septembr 2019.
- Daymut.J.A, (2019), Community Helpers Help Us Learn!/<https://www.handyhandouts.com/viewHandout.aspx?hh>, diakses 1 Oktober 2019.
- Delic.Z, Saric.H & Osmanovic.N, (2017), Significant of Social Capital in Socio-Ekonomic Development of Bosnia and Herzegovina/ *International Business Research*; Vol. 10, No. 3; 2017.
- Didik, R., (2019) Dalam Rangka Mewujudkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. TribunLampung Kamis, 5 September 2019.
- Habibullah, Irmayani, Mujiyadi,B, Suradi, Susantyo, Nainggolan, T, (2018). *Efektivitas Kinerja Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Daerah*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Flora.C & Arnold.N. (2012). Community Development, <https://int.serach.myway.com/search/> diakses 25 Jan 2019.
- Indarwati, (2014), Peranan Pekerja Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lansia) Di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes, Skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- Juliantara.K, (2014), Peran Pekerja Sosia Masyarakat dalam Membina Masalah Pekerja Seks Komersial di Tangerang Selatan, Sripsi, Program Studi Kesejahteraan Sosial, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Kholisah.A, (2013), Peran Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Kegiatan Pra Bencana Untuk Kesehatan Mental

- Korban Bencana (Studi Kualitatif Pada Taruna Siaga Bencana (Tagana) Di Kabupaten Jember), URL: <http://Repository.Unej.Ac.Id/Handle/123456789/2534>, diakses tanggal 30 September 2019.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbangkesos), (2018), Efektivitas Penyuluhan Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Jakarta.
- Suhendi, A., (2013), *The Role Of Local Community Leaders In Social Welfare Development*, *Informasi* Vol. 18, No. 02, Tahun 2013.
- Suradi, (2019), Karang Taruna, Agen Perubahan dan Pengembangan Masyarakat, *Sosio Konspesia* Vol 09 No 02, Mei-Agustus 2019.
- Susantyo, B, Sugiyanto, Habibullah, Suradi, Irmayani, Nainggolan, T & Mujiyadi, B, (2018), *Optimalisasi Peran dan Fungsi Pendamping Sosial*: Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Suyanto, (2006), Profil WKSBM dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat di Yogyakarta, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol 10 No 02, hal 59 – 72.